



**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI PENUTUPAN MASA SIDANG III
TAHUN SIDANG 2013-2014**

KAMIS, 6 MARET 2014



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI PENUTUPAN MASA SIDANG III
TAHUN SIDANG 2013-2014
Kamis, 6 Maret 2014**

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Salam Sejahtera bagi kita sekalian,

Yang kami hormati,

- **Para Wakil Ketua,**
- **Pimpinan Fraksi-fraksi;**
- **Pimpinan Komisi, Badan-Badan, dan Alat Kelengkapan Dewan;**
- **Para Anggota Dewan;**

Alhamdulillahirobbil 'Alamin, dengan ridho Allah SWT kita kembali hadir pada Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang III Tahun Sidang 2013-2014, yang telah berlangsung selama 36 hari kerja dimulai tanggal 15 Januari hingga tanggal 6 Maret 2014.

Besok pagi DPR akan menjalani masa reses sampai dengan 11 Mei 2014. Pimpinan berharap pada Masa Persidangan IV yang Insya Allah akan dibuka tanggal 12 Mei 2014, kita semua dapat bertemu kembali untuk melanjutkan tugas-tugas konstitusional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Tata Tertib DPR. Diperlukan semangat dan kerja keras para Anggota DPR agar pelaksanaan fungsi-fungsi utama DPR, dapat berjalan secara optimal, efektif dan efisien. Memang cukup banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan sebelum DPR mengakhiri masa baktinya tanggal 30 September yang akan datang. Tidak hanya dalam penyelesaian produk perundang-undangan tetapi juga dalam proses anggaran yang akan ditangani dalam Masa Sidang IV dalam bentuk Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN 2015.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Selama Masa Persidangan III Tahun Sidang 2013-2014 Dewan telah menuntaskan 5 (lima) RUU, yang terdiri dari 2 (dua) RUU prioritas yaitu RUU tentang Perdagangan dan RUU tentang Keinsinyuran, serta 3 (tiga) buah RUU kumulatif terbuka yaitu RUU tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Korea tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana, RUU tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dengan Republik India tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana, dan RUU tentang

Pengesahan Konvensi Internasional Penanggulangan Tindak Terorisme Nuklir Perserikatan Bangsa Bangsa 2005.

Salah satu misi arah pembangunan Indonesia 2005—2025 adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing dengan mengedepankan pembangunan sumber daya yang berkualitas dan berdaya saing, meningkatkan pengusaha dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mewujudkan misi luhur ini perlu adanya pengaturan yang dapat menjamin terwujudnya sumber daya manusia Indonesia berkualitas dan bermartabat di berbagai bidang. Profesi Insinyur adalah profesi penting yang memiliki peran strategis dan sangat dibutuhkan sebagai tenaga penggerak pembangunan. Itulah sebabnya DPR berinisiatif menyusun RUU tentang Keinsinyuran yang telah dibahas secara intensif dan selesai pada masa sidang ini. Peningkatan kualitas dan kuantitas insinyur Indonesia pada gilirannya diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk lokal sehingga dapat juga meningkatkan daya saing bangsa di kancah global.

Dalam kesempatan ini Dewan mengapresiasi atas selesainya pembahasan RUU tentang Perdagangan oleh Komisi VI menyusul juga telah diselesaikannya RUU tentang Perindustrian pada masa sidang lalu. UU tentang Perdagangan memiliki nilai strategis karena sejak berdirinya NKRI belum ada UU yang mengatur tentang perdagangan secara menyeluruh. UU tentang Perdagangan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi berdasarkan asas kepentingan nasional, kepastian hukum, keadilan, dan akuntabel dengan menekankan kepada prinsip kemandirian dan kemitraan. Melalui keberadaan UU tentang Perdagangan maka setiap peraturan yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan harus disinkronisasi sehingga dapat sejalan dengan usaha mensejahterakan rakyat.

Selain itu, UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian substansi materinya menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat kecil melalui pemberdayaan industri kecil dan menengah. UU tentang Perindustrian ini telah mengatur mengenai pengembangan sentra-sentra industri kecil dan menengah serta pemberdayaannya dalam rangka menyongsong *ASEAN Economic Community 2015*.

Di samping itu RUU tentang Desa yang telah diundangkan menjadi UU No 6 Tahun 2014 merupakan landasan hukum bagi kebangkitan ekonomi pedesaan, mempercepat pembangunan desa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat desa, dan memperkuat Desa sebagai entitas masyarakat yang mandiri. Sedangkan UU No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menekankan aspek perlindungan kepada masyarakat petani. Sedangkan UU No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS mengamanatkan untuk menyelenggarakan jaminan sosial kesehatan masyarakat sehingga dengan UU ini masyarakat memperoleh manfaat sebaik-baiknya di bidang kesehatan. Beberapa UU tersebut adalah contoh undang-undang yang menjadi perhatian Dewan yang berorientasi kepada kepentingan rakyat.

Namun demikian tugas legislasi DPR tidak berhenti sampai disahkannya RUU di DPR pada pembicaraan Tingkat II. Tugas kita selanjutnya adalah mengawasi agar berbagai Undang-undang tersebut segera diikuti dengan pembentukan berbagai peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian manfaat keberadaan UU ini langsung dirasakan oleh rakyat.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Adapun RUU-RUU lain, pembahasannya masih akan berlanjut, mudah-mudahan masa sidang yang akan datang kegiatan Dewan akan diwarnai dengan penyelesaian berbagai RUU yang sudah memasuki pembicaraan tingkat I yang proses pembahasannya sudah cukup lama. Perlu dipahami oleh masyarakat bahwa dalam setiap pembahasan RUU baik RUU inisiatif DPR maupun yang datang dari Pemerintah, DPR selalu terbuka terhadap segala masukan, baik dari para pakar, para pemangku kepentingan, tak terkecuali pada saat pembahasan RUU tentang KUHP dan RUU tentang Hukum Acara Pidana (HAP) yang sedang dilakukan oleh DPR pada tingkat Panja Komisi III. Kita semua berharap pembahasan kedua RUU tersebut dapat diselesaikan dalam periode DPR sekarang ini karena kedua RUU tersebut dapat menjadi karya besar yang dipersembahkan bagi kepentingan pembangunan hukum nasional.

Beberapa RUU Inisiatif AKD juga telah mendapat persetujuan Rapat Paripurna menjadi RUU Inisiatif DPR. RUU tersebut adalah RUU Inisiatif Komisi I tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI, dan RUU Inisiatif Komisi V tentang Pencarian dan Pertolongan.

Sidang Dewan yang Kami Hormati,

Tahun 2014 merupakan tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2009-2014. Dalam konteks kesinambungan pembangunan, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2014 menjadi basis yang penting bagi proses transisi ke tahap pembangunan berikutnya, yaitu RPJMN 2015-2019. RAPBN 2015 yang merupakan tahapan implementasi tahun pertama RPJMN 2015-2019 akan dibahas oleh DPR periode ini. Dalam masa sidang ini Badan Anggaran bersama Pemerintah telah menyepakati agenda pembahasan RAPBN, khususnya APBN 2015 yang akan diselesaikan pada akhir September 2014 atau lebih cepat satu bulan dari agenda normal. Oleh karena itu, Komisi bersama pasangan kerjanya masing-masing agar dapat menyesuaikan dalam membahas RKAKL.

Selain itu, fokus pembahasan APBN yang menjadi agenda sampai dengan akhir masa bakti adalah Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN 2015 yang direncanakan pada tanggal 20 Mei sampai dengan 8 Juli, sedangkan Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2013 pada awal Juli sampai dengan awal September.

Dalam kaitannya dengan anggaran DPR Tahun 2014, DPR telah memiliki Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran DPR RI (AKUPA) Tahun 2014 yang disusun oleh BURT bersama dengan Sekretariat Jenderal. Dengan arah kebijakan ini ke depan, diharapkan dapat mendorong kegiatan DPR yang berbasis kinerja dengan lebih efektif dan efisien.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, pada masa sidang ini, beberapa tim pengawas telah melakukan kegiatan secara efektif antara lain Tim Pengawas Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Tim berpendapat bahwa permasalahan penempatan dan perlindungan TKI merupakan masalah harkat dan martabat bangsa, sangat kompleks, dan bersifat lintas sektoral. Dari pertemuan secara intensif antara Timwas dengan berbagai *stakeholders* yang terkait TKI, melalui forum rapat kerja, rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum terlihat masih lemahnya koordinasi lintas kementerian atau lembaga terutama berkaitan dengan pengawasan.

Timwas TKI akan menitikberatkan perhatian pada pengawasan di dalam negeri, antara lain mengawasi penindakan terhadap Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang bermasalah. Adapun untuk pengawasan luar negeri Tim Pengawas juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian bilateral penempatan dan perlindungan TKI yang baru-baru ini ditandatangani antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Arab Saudi. Perhatian lain juga diberikan kepada TKI yang bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) yang minim perlindungan di negara lain.

Sementara itu, Tim Pemantau DPR RI mengenai Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pelaksanaan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, masih melanjutkan pemantauannya. Tim Pemantau telah melakukan kunjungan kerja ke Banda Aceh pada akhir Januari 2014 untuk mengetahui kondisi terkini pembangunan di Aceh terutama berkaitan dengan program yang menjadi prioritas dalam otonomi khusus. Tim Pemantau telah memperoleh laporan mengenai perkembangan revitalisasi BUMN yang berada di Provinsi Aceh. Tim menekankan kepada Pemerintah untuk mempercepat penyelesaian peraturan perundang-undangan yang diamanatkan oleh UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh agar program peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh dapat segera diimplementasikan.

Tim pemantau juga telah melaksanakan pertemuan dengan beberapa menteri terkait bidang perekonomian, politik, dan keamanan beberapa hari yang lalu. Dalam pertemuan tersebut disimpulkan beberapa hal krusial antara lain adalah divestasi saham oleh PT. Freeport

Indonesia, penambahan alokasi gas untuk kepentingan domestik oleh Tangguh LNG, dan pentingnya pengamanan dalam rangka pelaksanaan Pemilu di Aceh dan Papua.

Adapun Tim Pengawas Penyelesaian Kasus Bank Century melanjutkan tugasnya pada masa sidang ini, yaitu mengawasi pelaksanaan rekomendasi dan proses penelusuran aliran dana serta pemulihan aset dengan kewenangan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan DPR. Tim Pengawas DPR terus melanjutkan kegiatannya mengawal dan memonitor penyelesaian yang telah dan sedang dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti KPK. Dewan perlu mengingatkan kembali bahwa kasus ini menjadi sorotan publik. Oleh karenanya, kepada lembaga penegak hukum diharapkan dapat menyelesaikan kasus ini secara tuntas.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam masa sidang ini, Komisi-komisi DPR melakukan rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan melakukan uji kepatutan dan kelayakan pejabat publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Baru-baru ini, Komisi III telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap tiga calon hakim agung yang diajukan oleh Komisi Yudisial. Akhir dari seleksi yang dilakukan secara ketat, ketiganya tidak mendapat persetujuan untuk ditetapkan menjadi hakim agung karena dinilai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 24A ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Masa Persidangan III ini pula, DPR telah memberikan persetujuan terhadap Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) periode tahun 2014 – 2019, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 13 UU No. 30 Tahun 2007 Tentang Energi. DEN diberi tugas dan wewenang untuk menyusun Kebijakan Energi Nasional sebagaimana telah tercantum dalam Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Energi Nasional.

Selain itu dewan juga telah memberikan persetujuan terhadap Rancangan Kebijakan Energi Nasional sesuai dengan amanat Pasal 11 UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi. Adapun kebijakan energi nasional dimaksud meliputi: ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional; prioritas pengembangan energi; pemanfaatan sumberdaya energi nasional; dan cadangan penyangga energi nasional.

DPR RI melalui Komisi XI juga memberikan persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan tahunan BPK tahun 2013. Yaitu KAP Husni, Mucharam dan Rasidi sebagai KAP untuk melakukan pemeriksaan dimaksud.

Sidang Dewan yang terhormat,

Komisi III sedang memproses pengisian dua calon hakim konstitusi setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan UU No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Mahkamah Konstitusi. Hal penting segera dilakukan oleh DPR untuk mengisi kekosongan dua hakim konstitusi untuk dapat segera terisi mengingat Pemilu 2014 akan segera berlangsung yang dikuatirkan adanya sengketa hasil Pemilu akan diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Proses pengisian ini melibatkan para pakar/ahli, agar hasil seleksi ini dapat benar-benar terpilih hakim konstitusi yang berintegritas, profesional di bidangnya, tidak tercela dan seorang negarawan.

Sidang Dewan yang Kami Muliakan,

Komisi VIII DPR RI juga telah melakukan Rapat kerja dengan Menteri Agama RI untuk membahas BPIH tahun 1435 H/2014 M. Disepakati bahwa BPIH tahun 1435 H/2014 M adalah rata-rata sebesar USD 3.219 (Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Dolar Amerika) atau turun sebesar USD 308 (Tiga ratus Delapan dolar amerika) dari tahun 1434 H/2013 M yaitu sebesar USD 3.527 (Tiga Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Dolar Amerika).

Komisi IV dalam masa sidang ini juga telah melakukan pembahasan terhadap perubahan peruntukan kawasan Hutan. Hasil bahasan telah dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPR RI. Komisi IX DPR RI telah melakukan rapat kerja dengan menteri BUMN dengan agenda penjelasan pemerintah terhadap perkembangan pelaksanaan rekomendasi Panja Outsourcing BUMN Komisi IX DPR RI. Adapun kesimpulan dari hasil rapat tersebut antara lain baik Menteri BUMN maupun komisi IX Sepakat menghapus kelompok usaha yang menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak diperbolehkan menggunakan penyerahan sebagian pekerjaan dan perjanjian pemborongan pekerjaan (*outsourcing*) dengan menerbitkan surat edaran Menteri BUMN per tanggal 5 Maret 2014. Komisi IX DPR RI dengan Menteri BUMN dan Menakertrans menyepakati untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) gabungan dari kedua kementerian untuk melaksanakan rekomendasi Panja Outsourcing Komisi IX DPR RI selambat-lambatnya 12 Maret 2014. Satgas dalam menyelesaikan persoalan Outsourcing harus melibatkan Serikat Pekerja Outsourcing perusahaan masing-masing.

Dalam masa sidang ini pun BAKN DPR RI telah memberikan laporan didalam Rapat Paripurna mengenai kegiatan penelaahan atas IHPS II Tahun 2012, IHPS I Tahun 2013, Laporan hasil pemeriksaan Investigatif (Tahap II) BPK RI atas pembangunan pusat pendidikan dan sekolah olah raga nasional hambalang pada kementerian Pemuda dan olah Raga di Jakarta dan Bogor, serta laporan keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012. Ada 2 Program Pemerintah yang telah dilakukan investigasi oleh BAKN yaitu (1) Program tunjangan Profesi

Guru (2) Program Subsidi Pupuk. Kegiatan ini dilakukan karena banyaknya keluhan masyarakat atas pelaksanaan kedua program dimaksud.

Hal lain yang juga menjadi perhatian Dewan adalah terkait persoalan yang dihadapi BUMN Merpati Nusantara Airlines (MNA). Dewan mempertanyakan kinerja manajemen yang menyebabkan Merpati terus merugi dalam beberapa tahun terakhir. Dewan menilai pengelolaan Merpati tidak dilakukan dengan baik melalui pendekatan manajemen bisnis. Jalur penerbangan perintis sebenarnya dapat menghasilkan keuntungan asal dikelola dengan pendekatan bisnis dan efisiensi di berbagai lini usaha.

Apabila Merpati terus merugi karena kesalahan manajemen, maka pihak manajemen harus bertanggung jawab. Dewan juga berpendapat bahwa BPK perlu memantau, mengawasi, dan melakukan investigasi dana bantuan atau dana talangan dari Pemerintah dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) melalui APBN yang telah mencapai lebih dari Rp1 triliun.

Sidang Dewan yang terhormat,

Sejak akhir tahun 2013 hingga awal tahun 2014, berbagai bencana terus melanda di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari banjir, longsor, erupsi gunung berapi, kabut asap dan bencana lain telah menambah duka mendalam bagi bangsa Indonesia. Bencana tersebut telah menelan ratusan korban jiwa, korban luka-luka, dan jutaan pengungsi. Selain itu kerusakan terjadi pada berbagai infrastruktur seperti jalan, jembatan, bangunan, lahan pertanian, perkebunan dan peternakan.

Dampak ekonomi dan sosial yang telah terjadi sangat besar. Perkiraan awal kerugian dan kerusakan akibat bencana banjir bandang di Sulawesi Utara erupsi Gunung Sinabung, erupsi Gunung Kelud, banjir Pantura dan banjir Jakarta, yang kesemuanya mencapai triliunan rupiah.

Dalam menghadapi situasi ini, Dewan menghimbau agar pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk terus melakukan koordinasi untuk bertindak cepat dalam menangani berbagai dampak yang ditimbulkan oleh bencana tersebut. Penanganan terhadap para korban bencana serta perbaikan infrastruktur yang telah rusak pasca bencana harus mendapat prioritas utama.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dewan juga menaruh perhatian terhadap Ujian Nasional tingkat SMP dan SMA/SMK dan yang sederajat yang akan dilaksanakan pada tanggal 14-16 April 2014 untuk tingkat SMA dan 5-8 Mei 2014 untuk tingkat SMP. Setiap tahunnya penyelenggaraan UN selalu menjadi isu yang selalu mencuat di publik dan menjadi salah satu penyebab kegelisahan siswa dan orang tua. Dewan berharap pelaksanaan UN tahun ini agar disiapkan sebaik mungkin sehingga tidak

terjadi berbagai kendala seperti tahun sebelumnya. Selain itu persiapan pelaksanaan UN juga harus dilakukan secara matang serta dengan tetap menjaga kualitasnya baik dari sisi materi, pelaksanaan, pengawasan, serta hasilnya.

Hal yang sama pentingnya dengan dunia pendidikan adalah perlunya kita mengimplementasikan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN), dalam mewujudkan "Indonesia Bebas Narkoba 2015". Perang terhadap penyalahgunaan Narkoba adalah tugas bersama, baik pemerintah maupun masyarakat secara umum. Hal ini dilakukan karena Dewan meyakini sepenuh hati bahwa perang terhadap narkoba sebenarnya adalah menyelamatkan generasi bangsa di masa yang akan datang dari kehancuran.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam masalah-masalah internasional, Dewan menaruh perhatian antara lain perkembangan yang kurang menggembirakan dalam hubungan diplomatik Indonesia dengan negara tetangga, Singapura. Terdapat perbedaan pandangan di antara kedua negara berkaitan dengan keputusan Pemerintah Indonesia dalam penamaan salah satu Kapal Perang Republik Indonesia. Tanpa mengabaikan nota keprihatinan yang telah mereka sampaikan, sebagai negara sahabat, Pemerintah Singapura perlu menghormati keputusan Pemerintah Indonesia untuk menyematkan nama pahlawan pada kapal perang karena hal itu merupakan wujud penghormatan bangsa Indonesia terhadap pahlawan yang telah berbakti dan berkorban untuk bangsa dan negaranya.

Sebagai dua negara bertetangga dan sesama negara anggota ASEAN yang memiliki berbagai kepentingan yang selaras, perbedaan pandangan yang ada hendaknya dapat ditangani dengan baik. Bangsa Indonesia dan Singapura, bersama-sama negara sahabat lainnya di kawasan memiliki agenda kerja sama yang sangat luas untuk menciptakan kawasan yang stabil dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat.

Terkait dengan kegiatan diplomasi parlemen, perlu kami sampaikan bahwa beberapa waktu lalu kita menerima kunjungan Delegasi Parlemen negara-negara sahabat, di antaranya kunjungan Delegasi Parlemen Iran. Berbagai isu dibahas dalam pertemuan itu, termasuk isu perdagangan dan investasi kedua negara. Dalam kesempatan tersebut, Delegasi Parlemen Iran menyampaikan harapan mereka bagi terjadinya peningkatan kerjasama di bidang energi dengan Pemerintah Indonesia. Ketua Delegasi Parlemen Iran mengungkapkan bahwa sektor swasta Iran sangat antusias untuk bekerja sama dengan sektor swasta Indonesia.

Masih terkait dengan diplomasi parlemen, sejak awal tahun 2014 ini DPR RI telah mengirimkan delegasi untuk berpartisipasi pada beberapa forum kerjasama parlemen

multilateral. Pada 12-15 Januari 2014, delegasi DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR/Korinbang turut menghadiri Sidang Tahunan ke-22 *Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF)* di Puerto Vallarta, Meksiko. Isu politik dan keamanan menjadi isu yang paling mengemuka pada Sidang APPF kali ini, terutama yang berkaitan dengan perkembangan politik di kawasan Asia Timur dan Timur Tengah. Selain itu, delegasi DPR RI yang dipimpin oleh wakil ketua DPR/Korekku telah menghadiri konferensi ke 9 PUIC di Teheran pada tanggal 14 – 19 Februari 2014. Konferensi telah membahas berbagai isu yang menjadi kepentingan negara-negara anggota organisasi kerjasama islam antara lain isu Palestina, Suriah dan Mesir.

Sidang Dewan yang terhormat,

Besok pagi DPR memasuki masa reses. Pimpinan berkeyakinan bahwa sebagian besar para anggota Dewan yang mencalonkan kembali sebagai anggota DPR periode 2014—2019 akan memaksimalkan masa reses, kembali ke Dapil masing-masing untuk berkampanye, menyongsong pemilu legislatif yang akan digelar tanggal 9 April 2014. Kita semua berharap agar Pemilu berjalan aman, dan lancar. Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat, dimana calon legislatif dan rakyat secara bersama-sama berperan dalam membangun demokrasi. Pemilu juga menjadi sarana pendidikan politik bagi rakyat, untuk itu rakyat diberikan haknya untuk terlibat secara langsung memberikan suara.

Dewan mengingatkan bahwa kegiatan ini harus berlandaskan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif dan berbagai peraturan yang dikeluarkan KPU sebagai Penyelenggara Pemilu. Oleh karenanya, Pimpinan Dewan berharap agar pada saat kampanye, semua peserta dan Calon Legislatif memperhatikan berbagai peraturan, dengan tidak melanggar rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh KPU, tidak memunculkan isu SARA, dan tidak melakukan provokasi yang dapat memecah-belah persatuan dan kesatuan bangsa.

Di sisi lain, tingkat golput perlu diminimalisir. Rakyat harus diberikan pemahaman yang benar bahwa dengan berpartisipasi memilih dalam Pemilu, mereka akan dapat ikut menentukan masa depan bangsa.

Dewan juga memperhatikan peringatan Bawaslu bahwa kerawanan pelanggaran yang sering terjadi dalam rangka pelaksanaan Pemilu adalah adanya potensi pencurian suara. Dewan mendorong agar Bawaslu terus menyempurnakan pemetaan dengan membangun tabulasi berbasis harian untuk semua TPS. Bawaslu harus mensosialisasikan pola identifikasi kerawanan di TPS kecamatan-kecamatan di seluruh Indonesia. Dewan juga mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi jalannya Pemilu 2014 demi terciptanya proses demokrasi bagi kemajuan bangsa.

Terkait masalah dana saksi parpol pada Pemilu Legislatif, kita masih menunggu keputusan yang terbaik yang dapat diterima masyarakat dan peserta pemilu. Dewan mengingatkan kembali bahwa persoalan dana saksi ini telah diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Keberadaan Saksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyelenggaraan Pemilu. Masyarakat perlu memahami bahwa keberadaan Saksi ini dimaksudkan untuk mencegah praktik kecurangan, sehingga Pemilu dapat berlangsung dengan Luber dan Jurdil.

Sidang Dewan yang terhormat,

Mengakhiri pidato ini, Dewan mengharapkan pada masa reses seluruh anggota Dewan dapat menggunakan waktu seefektif mungkin untuk kegiatan bersama konstituen di masing-masing daerah pemilihan. Tidak lupa Dewan mengharapkan kepada anggota Dewan agar dapat berperan aktif untuk menjaga suasana kondusif menjelang Pemilu Legislatif. Demikian pidato yang saya sampaikan dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang III Tahun Sidang 2013-2014. Atas segala perhatian saudara kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahiwabarakatuh.

Jakarta, 6 Maret 2014

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Dr. H. Marzuki Alie